

Pelatihan Peningkatan Kinerja untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam

Moh. Mustofa¹, Moehadi², Bima Permana Putra³, Dimas Agung Sasmito⁴

¹Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: mohtoefa123@gmail.com

²Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: moe.hady@gmail.com

³Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: bimapermana945@gmail.com

⁴Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: dhimaspriyoajiprayogo@gmail.com

Article History:

Received: 28 Desember 2024

Revised: 10 Juni 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Keywords: Good Governance,
Village Apparatus,
Performance, Government
Governance.

Abstract: Village apparatus performance improvement training is a strategic step in realizing a good governance system in Mojodelik Village, Gayam District. This program aims to improve the capacity of village apparatus in transparent, accountable, and effective governance. The main problems faced before mentoring include low understanding of the principles of Good Governance, weak village financial management, and less than optimal public services and community participation in village development. Mentoring is carried out through training, technical guidance, mentoring by experts, and periodic evaluations to ensure sustainable implementation. The results of the mentoring show significant improvements in aspects of administration, budget management, and more responsive and digital-based public services. In addition, village apparatus have become more professional in carrying out their duties, and the community has become more active in participating in village development planning. The implication of this program is the creation of a more transparent, efficient, and community-oriented village government system.

INTRODUCTION

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan warga. Sistem pemerintahan yang baik akan mendorong efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi (Saleh et al., 2024). Selain itu, dengan adanya pemerintahan yang baik, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan warga dalam pembangunan daerah (Kamaluddin, 2019). Dalam hal pemerintahan desa, seperti di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam, penerapan sistem yang baik akan meningkatkan kinerja aparatur desa, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta menjamin pembangunan desa yang lebih baik.

Desa Mojodelik Kecamatan Gayam, sebagai desa yang memiliki banyak sumber daya

alam dan budaya yang kaya, pengelolaan pemerintahan yang efektif masih menjadi tantangan. Banyaknya persoalan yang dihadapi, seperti minimnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas layanan publik, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur desa sangat diperlukan. Dengan adanya persoalan tersebut, prinsip-prinsip good governance menjadi salah satu soalusi yang tepat untuk diterapkan. Good governance mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek pemerintahan desa (Astuti et al, 2024). Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan perangkat desa mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan warga, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Pelatihan peningkatan kinerja bagi aparatur desa perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, aparatur desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola pemerintahan, manajemen pelayanan publik, serta regulasi yang berlaku (Sudrajat, 2021). Tanpa pelatihan yang memadai, terdapat risiko rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, lemahnya pengelolaan anggaran desa, serta kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan aparatur desa dapat bekerja lebih profesional, responsif terhadap kebutuhan warga, serta mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong pembangunan desa yang baik serta terciptanya daya saing desa (Susilo et al., 2024).

Pelatihan peningkatan kinerja aparatur desa perlu dilakukan karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti rendahnya pemahaman terhadap prinsip good governance, kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa, serta rendahnya kualitas pelayanan publik (Sofyani et al., 2020). Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi kendala utama. Tanpa peningkatan kapasitas yang memadai, aparatur desa sulit menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya kegiatan ini dampak yang diharapkan yaitu tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik di Desa Mojodelik. Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus untuk membangun kapasitas aparatur desa

Mojodelik agar mampu menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini akan mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan para perangkat desa dapat merespons berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Setelah adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat yang sangat beragam dan signifikan bagi Desa Mojodelik. Terutama tentang peningkatan kapasitas aparatur desa akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan pelatihan yang tepat, perangkat desa akan lebih memahami manajemen, perencanaan, dan implementasi program, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang baik ini akan menciptakan kepuasan di kalangan warga desa dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa.

METHOD

Pendekatan pendampingan dalam pelatihan ini dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan (Susilo et al, 2024). Pendekatan ini digunakan agar aparatur desa dapat lebih mudah memahami serta mengaplikasikan materi yang diberikan. Metode yang digunakan mencakup mentoring dan bimbingan teknis secara langsung, serta studi kasus yang relevan dengan kondisi pemerintahan desa. Selain itu, dilakukan sesi diskusi dan konsultasi untuk membantu aparatur desa dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik di desa. Selain itu, pembuatan forum diskusi dan refleksi untuk memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. forum ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi tentang keberhasilan dan kendala, serta mencari solusi bersama dengan menciptakan budaya saling mendukung dan terbuka, kegiatan pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pengembangan desa mojodelik.

RESULT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan aparatur desa dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Desa Mojodelik dipilih sebagai lokasi kegiatan mengingat pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap Analisis Kebutuhan

Tahap identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk memahami kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi aparatur desa.



Gambar 1. Tahap Observasi dan diskusi

Berdasarkan observasi dan diskusi dengan perangkat desa, ditemukan bahwa pemahaman mengenai prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Beberapa perangkat desa mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kegiatan secara sistematis dan akuntabel. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena proses pelayanan publik dinilai belum maksimal dan transparan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung turut memperburuk situasi, sehingga efektivitas kerja aparatur desa belum sepenuhnya optimal.

Hasil analisis menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Warga cenderung kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah desa sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara aparatur desa dan masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman dan

keterlibatan. Beberapa hasil analisis tentang pendampingan ini menunjukkan bahwa:

- a. Kurangnya Pemahaman Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- b. Keterbatasan Keterampilan Administrasi dan Manajemen.
- c. Minimnya Partisipasi Masyarakat.
- d. Kurangnya Sosialisasi dan Komunikasi yang Efektif.
- e. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi Pendukung.

Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Pendampingan ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diajak untuk memahami peran mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahapan selanjutnya dengan memberikan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial aparatur desa. Materi pelatihan mencakup perencanaan program, pengelolaan anggaran, pembuatan laporan yang sistematis, serta strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok, sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh.



Gambar 2. Pemberian Materi Konsep Good Governance

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui sesi ini, aparatur desa mulai memahami konsep dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Sosialisasi berhasil membuka wawasan peserta tentang peran krusial mereka dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan dalam kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan yang interaktif dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Materi pelatihan mencakup berbagai topik penting, seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan anggaran, pembuatan laporan yang akuntabel, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pelatihan dimulai dengan penyampaian materi teori yang memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip good governance dan penerapannya dalam konteks pemerintahan desa. Selain itu, peserta juga dilatih untuk mengelola anggaran desa dengan transparan, mengembangkan sistem pelaporan yang jelas, dan memastikan setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Dalam pelatihan yang difokuskan pada Good Village Government (Pemerintahan Desa yang Baik), beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:

- a. Transparansi: Mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan program desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa dengan jelas.
- b. Akuntabilitas: Aparatur desa bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta wajib memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Partisipasi: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa, agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
- d. Efektivitas dan Efisiensi: Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap Evaluasi

Kegiatan pelatihan mengenai Good Village Government di Desa Mojodelik memerlukan tahap evaluasi untuk mengukur sejauh mana tujuan pelatihan tercapai dan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah diajarkan dapat diterapkan secara efektif oleh aparatur Desa.



Gambar 3. Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi ini berfungsi untuk mengukur perubahan dalam sikap dan perilaku aparatur desa setelah mengikuti pelatihan. Misalnya, apakah mereka lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan lebih akuntabel dalam pelaporan kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, atau diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik dari peserta mengenai pengalaman mereka selama pelatihan. Selain itu, evaluasi juga dapat mencakup pengamatan langsung terhadap implementasi prinsip good governance di lapangan, seperti pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program desa. Beberapa poin hasil evaluasi dari pelatihan Good Village Government di Desa Mojodelik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program

No.	Indikator Keberhasilan	Sebelum Pendampingan		Setelah Pendampingan	
		Tata Kelola	Rendah, memahami transparansi dan akuntabilitas.	kurang prinsip dan	Meningkat, memahami dan menerapkan prinsip good governance.
1.	Pemahaman Pemerintahan				
2.	Kualitas Pelayanan Publik		Pelayanan lambat, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.		Lebih cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
3.	Pemanfaatan Teknologi		Minim penggunaan teknologi dalam administrasi dan layanan publik.		Mulai mengadopsi teknologi dalam pengelolaan administrasi desa.
4.	Partisipasi Masyarakat		Cukup, akan tetapi masyarakat kurang	tinggi,	lebih

		terlihat dalam aktif dalam perencanaan pembangunan desa.
5. Efektivitas Keputusan	Pengambilan	Pengambilan keputusan berpikir panjang dan terlihat ragu-ragu
6. Kesadaran Akan Tanggung Jawab	Peran dan	Masih banyak yang doble-job sehingga kurang efektif

DISCUSSION

Pendampingan yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan Desa Mojodelik telah membawa perubahan yang nyata dalam berbagai aspek tata kelola, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebelum adanya pendampingan, pengelolaan anggaran dan program desa terkadang cenderung dilakukan secara tertutup, dengan akses informasi yang terbatas bagi masyarakat, dan dengan media yang hanya bisa dimengerti oleh sekelompok masyarakat saja sehingga tidak menyeluruh. Aparatur desa belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada warga, sehingga banyak keputusan yang diambil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan jauh diluar pengetahuan masyarakat. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada masih bersifat formalitas dan kurang terstruktur, membuat masyarakat kesulitan dalam memahami bagaimana dana desa digunakan. Dalam hal partisipasi, keterlibatan warga dalam proses pembangunan desa masih sangat minim, dengan sedikit ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi ataupun memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan.

Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi kemajuan Desa Mojodelik, setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang intensif, aparatur desa mulai memahami pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Mereka mulai menyusun dan menyajikan anggaran desa dalam format yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa kini lebih aktif membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program dan kebijakan desa melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan pengumuman, forum musyawarah, serta media sosial desa. Tidak hanya itu, laporan kegiatan yang sebelumnya sulit diakses kini dipublikasikan secara lebih terbuka, sehingga warga dapat mengetahui perkembangan pembangunan desa serta ikut mengawasi pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat menjadi lebih

percaya terhadap pemerintah desa karena merasa dilibatkan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Selain transparansi, aspek akuntabilitas dalam pemerintahan desa juga mengalami kemajuan yang signifikan. Jika sebelumnya proses pelaporan dan pertanggungjawaban sering kali disusun secara kurang jelas dan sulit dipahami oleh masyarakat, kini aparatur desa telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Mereka mulai menyusun laporan kegiatan dan anggaran secara lebih terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, dalam setiap forum musyawarah desa, aparatur desa memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terbuka mengenai setiap kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun semakin meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat dari program-program pembangunan tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan, kini mereka lebih dilibatkan dalam berbagai tahap pengambilan keputusan. Pemerintah desa mulai mengadakan forum-forum musyawarah yang lebih inklusif, di mana warga didorong untuk menyampaikan pendapat, gagasan, serta aspirasinya terkait pembangunan desa. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan serta harapan mereka. Dengan adanya keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat, pembangunan desa menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kebijakan, anggaran, serta program-program desa. Sementara itu, dengan adanya sistem akuntabilitas yang lebih baik, setiap keputusan yang diambil oleh aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih jelas dan transparan. Di sisi lain, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kebijakan pembangunan desa menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Salah satu teori yang mendukung pelaksanaan program ini adalah Teori Good

Governance. Teori *Good Governance* menekankan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan (Yeheschiel et al, 2020). Dalam konteks pelatihan peningkatan kinerja aparatur desa, teori ini menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan, aparatur desa dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk mengelola administrasi pemerintahan secara lebih tertib, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implikasi hasil pendampingan ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, pelayanan publik menjadi lebih cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi desa juga meningkat, mendukung efisiensi dalam pengelolaan data dan layanan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa semakin aktif, menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, hasil pendampingan ini berkontribusi pada terciptanya sistem pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Pendampingan ini telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Aparatur desa kini lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait anggaran dan kegiatan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memahami pengelolaan dana desa. Selain itu, sistem pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban kini lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan terpercaya. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan desa kini semakin meningkat melalui forum musyawarah yang lebih inklusif. Selain itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga mengalami peningkatan, memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal.

REFERENCES

Astuti, H., Susilo, J. H., Atmaja, D. S., Alfiyana, S., & F. (2024). Pendampingan penentuan

konsep tata kelola pemerintah desa yang akuntabel dan transparansi. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 72–91.

Hadi Susilo, J., Agustina Rahmawati, L., Mustofa, M., Alwi Abid, M., & Surya Atmaja, D. (2024). Analisis Daya Saing Desa Wisata Di Kabupaten Bojonegoro Analysis of the Competitiveness of Tourism Villages in Bojonegoro District. *Juurnal Dimensi*, 13, 379–396. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>

Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228. https://core.ac.uk/display/229023113?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

Saleh, A. M., Hukum, S. M., & Mulawarman, U. (2024). Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 409–420.

Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.

Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 395–402.

Susilo, J. H., Handayani, T. A., Astuti, H., Rahmawati, L. A., Suprastiyo, A., Atmaja, D. S., & Prasetya, A. B. (2024). Pendampingan pemanfaatan limbah sayuran rumah tangga menjadi pupuk organik cair dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 131–152.

Yeheschiel B. Marewa , Marcel Tanan. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.46>